

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan sebuah negara dengan komposisi masyarakat majemuk yang sangat unik. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (2010) di Indonesia, terdapat masyarakat yang terdiri dari seribu lebih suku bangsa. Salah satu dari suku bangsa tersebut merupakan suku bangsa Tionghoa Indonesia yang mencakup 1.2 persen dari total populasi di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2010).

Etnis Tionghoa adalah kelompok etnis yang sudah lama menetap di Indonesia. Tercatat bahwa etnis Tionghoa mulai menetap di Indonesia semenjak abad ke 17 dan pertama kali menetap di daerah Batavia (Turner & Allen, 2007). Pada zaman tersebut, kebijakan segregasi diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga masyarakat Indonesia terbagi menjadi tiga golongan dengan strata sosial dan hak yang berbeda-beda. Orang-orang Eropa berada pada strata sosial tertinggi, orang-orang keturunan asing seperti orang Tionghoa dan Arab menempati strata menengah dan orang-orang asli Indonesia dulu memiliki status sosial terendah (Winarta, dalam Suryadinata, 2008).

Menurut Matahari, Iriani, dan Lianawati (2005) warga keturunan Tionghoa sejak masa awalnya di Indonesia tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan warga asli Indonesia. Beberapa pendapat yang dirangkum oleh Matahari dkk. menjelaskan bahwa hubungan antara kedua kelompok etnis tersebut diwarnai rasa

permusuhan yang berkepanjangan. Sejak tahun 1825 sampai tahun 1998 hubungan antara kedua kelompok tersebut diwarnai oleh konflik yang terus berlanjut.

Menurut Setiono (2008) pemisahan antara orang-orang Tionghoa dan Indonesia asli memunculkan kecemburuan, kebencian dan prasangka antara kedua kelompok tersebut. Dampaknya, kekerasan terhadap etnis Tionghoa terjadi beberapa kali seperti di Kota Batavia, Kudus dan Ngawi (Setiono, 2008). Memasuki masa kemerdekaan Indonesia dimulailah upaya-upaya untuk mengasimilasikan etnis Tionghoa dengan masyarakat Indonesia. Kebijakan asimilasi diberlakukan dengan cara membatasi kemampuan berdagang etnis Tionghoa. Di masa ini, sentimen negatif masyarakat terhadap etnis Tionghoa juga menyebabkan konflik di daerah Tegal, Cirebon, Bandung dan Sukabumi (Allen, Turner, 2007). Ketegangan antara etnis Tionghoa dan masyarakat Indonesia terus berlanjut hingga akhir masa pemerintahan Presiden Soekarno.

Di akhir pemerintahan masa presiden Soekarno, terjadilah perpindahan kekuasaan dari presiden Soekarno kepada presiden Soeharto melalui peristiwa kudeta (Allen & Turner, 2007). Sentimen masyarakat terhadap etnis Tionghoa makin memburuk di masa ini, dikarenakan pandangan bahwa individu-individu etnis Tionghoa cenderung mendukung komunisme yang dipandang negatif oleh masyarakat. Sehingga terjadi kembali kekerasan pada etnis Tionghoa (Djalal, dalam Turner & Allen, 2007). Dimulai dari tahun 1960 hingga tahun 1970 kebijakan asimilasi kembali diberlakukan. Penggunaan bahasa Tionghoa dilarang serta bentuk ekspresi dan perayaan kebudayaan Tionghoa dibatasi. Sekolah-sekolah serta institusi Pendidikan Tionghoa juga ditutup (Allen & Turner, 2007; Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967). Selain itu, individu etnis Tionghoa diharuskan

untuk memiliki surat keterangan kewarganegaraan serta mengganti nama mereka (Allen & Turner, 2007; Suryadinata, 1978). Pada akhirnya pandangan negatif yang ada pada masyarakat kembali menyebabkan kekerasan berbasis etnis di tahun 1998. Kekerasan terjadi di Jakarta, Medan, Surakarta dan kota-kota lain (Purdey, 2006).

Kerusuhan yang terjadi di tahun 1998 merupakan titik balik dalam sejarah etnis Tionghoa Indonesia. Konflik di tahun 1998 menyebabkan beberapa individu-individu etnis Tionghoa untuk meninggalkan identitas mereka sebagai etnis Tionghoa (Eriyanti, 2006). Disadur dari artikel CNN (2017) kerusuhan tahun 1998 juga menyebabkan ketakutan serta kekhawatiran yang membekas pada etnis Tionghoa. Meskipun demikian, kerusuhan pada tahun 1998 juga menghasilkan beberapa perubahan positif bagi etnis Tionghoa. Menurut Matahari dkk. (2005) terdapat juga kemungkinan bahwa etnis Tionghoa sudah lebih menyadari pentingnya akulturasi dengan warga setempat.

Pemerintah juga mulai mengimplementasikan kebijakan untuk mencegah diskriminasi antar kelompok etnis (Undang undang Nomor 40 Tahun 2008). Tan (2008) mengatakan melalui kerusuhan ini, masyarakat serta pemerintah mulai menerima etnis Tionghoa secara terbuka. Oleh karena perubahan secara sistematis dalam kebijakan-kebijakan pemerintah, perilaku diskriminasi terhadap etnis Tionghoa sudah sangat berkurang. Namun, setelah kerusuhan 1998 tidak ada diskusi terbuka ataupun penyelesaian terhadap kekerasan yang terjadi. Menurut Samsaeri dan Perkasa (dalam, Allen & Turner, 2007) perubahan dari segi peraturan merupakan suatu hal yang penting. Namun, perubahan tanpa disertai diskusi dan keterbukaan pada masyarakat menyebabkan stereotip, prasangka serta sentimen negatif bertahan. Selama ini, masyarakat cenderung memilih solusi yang bersifat

jangka pendek dan gagal melakukan perubahan jangka panjang yang bersifat preventif (Susanto, 2008).

Karena kurangnya komunikasi serta diskusi yang terbuka, sentimen negatif terhadap etnis Tionghoa masih terjadi hingga kini. Hasil yang didapatkan dari survei yang dilakukan pada tahun 2016 oleh *Indonesian National Survey Project* menemukan bahwa sebanyak 60% responden masih percaya bahwa etnis Tionghoa kemungkinan memiliki status ekonomi yang lebih tinggi, sebanyak 42% responden berpendapat bahwa etnis Tionghoa memiliki kebudayaan yang berbeda dan tidaklah cocok dengan Indonesia, sebanyak 47.6% responden masih percaya bahwa etnis Tionghoa cenderung memiliki kesetiaan terhadap negara Cina. Data ini menunjukkan bahwa terdapat pandangan-pandangan negatif terhadap etnis Tionghoa yang mungkin masih tertanam pada masyarakat.

Selain itu, di bidang politik masih terdapat diskriminasi serta prasangka terhadap orang-orang dengan etnis Tionghoa Indonesia. Etnis Tionghoa, dulu memang dilarang terlibat di dunia politik Indonesia (Anggraeni, 2017). Namun, sejak Indonesia masuk ke dalam masa reformasi, etnis Tionghoa mulai memiliki representasi dan partisipasi di dunia politik (Hoon, 2006). Meskipun demikian, pemilihan gubernur DKI Jakarta di tahun 2017 menunjukkan bahwa diskriminasi etnis masih terjadi.

Pada pemilihan gubernur DKI Jakarta di tahun 2017, beberapa kelompok masyarakat melakukan protes dan demo terhadap mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Protes dan demo terjadi karena Basuki Tjahaja Purnama, yang merupakan seorang individu dengan etnis Tionghoa dituduh melakukan penistaan terhadap suatu agama (Setijadi, 2017). Demo dan protes ini, yang

awalnya hanya ditujukan pada Basuki Tjahaja Purnama berujung pada sentimen negatif dan rasisme terhadap masyarakat etnis Tionghoa secara umum (Burhani, 2017).

Dari peristiwa-peristiwa yang sudah dijelaskan di atas, terlihat sebuah pola yang terjadi secara berulang. Menurut Wibowo (2001) kerusuhan-kerusuhan terjadi pada zaman kolonialisme, pasca kemerdekaan dan orde baru terjadi karena satu alasan yang sama. Kerusuhan terjadi karena sentimen-sentimen negatif, kebencian masyarakat terhadap etnis Tionghoa, dan dengan rasa frustrasi masyarakat akan kondisi ekonomi dan sosial mereka (Allen & Turner, 2007). Meskipun ada waktu dimana ketegangan antara kelompok menurun, sentimen negatif dan prasangka terhadap etnis Tionghoa akan segera muncul kembali ketika dipicu oleh peristiwa tertentu.

Proses ini, paling jelas terlihat pada peristiwa kerusuhan yang terjadi di tahun 1998. Pada tahun 1998, Indonesia sedang mengalami krisis moneter dan ketidakstabilan politik. Kondisi ekonomi masyarakat yang menurun serta ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan, menyebabkan kerusuhan meledak. Dalam Turner dan Seymour (2002) dijelaskan massa yang terlibat dalam kerusuhan dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, adalah kelompok mahasiswa yang terlibat dalam protes dan demo untuk mendorong terjadinya perubahan dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia. Kedua, adalah massa yang terdiri dari rakyat menengah kebawah yang frustrasi dengan kondisi sosioekonomi mereka. Rasa frustrasi ini, memunculkan kembali sentimen negatif serta prasangka terhadap etnis Tionghoa yang berujung pada kekerasan etnis.

Tanpa adanya diskusi atau pembicaraan mengenai sentimen negatif, stereotip dan prasangka yang ada pada masyarakat, besar kemungkinan bahwa kekerasan dan konflik antar etnis dapat terulang kembali. Karena Indonesia merupakan sebuah negara berkembang yang cenderung memiliki keadaan ekonomi tidak stabil. Sehingga perubahan pada kondisi sosioekonomi masyarakat, dapat kembali memicu terjadinya parasangka rasial.

Sentimen serta pandangan negatif yang masih ada di masyarakat dapat memengaruhi etnis Tionghoa secara negatif, karena perilaku dan pandangan negatif yang mereka alami secara spesifik terjadi oleh karena identitas etnis mereka. Oleh sebab itu, beberapa individu etnis Tionghoa menjadi ragu untuk mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari kelompok etnis Tionghoa Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Hoon (2006), Tan (2008), Anggraeni (2017), dan Suryadinata (2012) menjelaskan bahwa dampak utama dari diskriminasi terhadap etnis Tionghoa adalah lunturnya kebudayaan dan identitas etnis Tionghoa, serta perilaku eksklusif atau menutup diri. Pelunturan budaya, terjadi karena beberapa peraturan yang sebelumnya menghalangi ekspresi identitas etnis Tionghoa (Suryadinata, 2012). Salah satu dari kebijakan tersebut adalah mengharuskan etnis Tionghoa untuk mengubah nama mereka menjadi nama Indonesia (Keputusan Presiden No. 240 Tahun 1967). Selain itu, ada juga kebijakan yang melarang etnis Tionghoa merayakan kebudayaan Tionghoa seperti tahun baru Imlek (Instruksi Presiden No.14 Tahun 1967). Akhirnya, peraturan-peraturan tersebut menyebabkan etnis Tionghoa kurang menguasai dan mengerti budaya mereka (Suryadinata, 2012).

Perilaku eksklusif serta menutup diri yang dimiliki oleh beberapa individu etnis Tionghoa, kemungkinan merupakan akibat dari diskriminasi etnis yang menyebabkan beberapa individu merasa terancam. Ketika individu memersepsikan diskriminasi etnis sebagai sebuah ancaman, mereka umumnya akan berperilaku secara defensif. Bagi beberapa individu etnis Tionghoa bergaul dengan orang-orang etnis Tionghoa saja merupakan cara untuk mempertahankan diri dari diskriminasi. Dengan mendekati diri mereka dengan sesama etnis Tionghoa, dan menghindari orang-orang dari etnis lain, mereka bisa mendapat dukungan dan penerimaan serta menghindari diskriminasi dari kelompok lain. Di satu sisi, hal ini dapat berdampak positif terhadap *collective self-esteem* dari individu-individu etnis Tionghoa. Namun, di sisi lain, perilaku menutup diri ini berdampak buruk pada relasi antar kelompok etnis (Anggraeni, 2017).

Dua fenomena ini menunjukkan kemungkinan bahwa pengalaman diskriminasi yang dialami oleh individu etnis Tionghoa bisa memengaruhi identitas etnis mereka secara negatif dan positif. Pengalaman diskriminasi yang dialami oleh etnis Tionghoa, mengakibatkan mereka harus beradaptasi dengan cara menyerap dan menginternalisasi norma-norma dan pandangan masyarakat yang ada di sekitar mereka sehingga mereka dapat dengan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Disaat yang sama ketika etnis Tionghoa memersepsikan diskriminasi sebagai ancaman, mereka mungkin bereaksi dengan cara menutup diri mereka.

Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Tajfel dan Turner (1978), pelunturan kebudayaan dan perilaku menutup diri adalah suatu tanda bahwa kelompok individu memiliki identitas sosial yang terganggu. Identitas sosial adalah bagian dari konsep diri individu yang berhubungan dengan keanggotaan seorang

individu terhadap sebuah kelompok sosial. Menurut Tajfel, seorang individu akan membangun sebuah ikatan emosional terhadap kelompok-kelompok sosial yang mereka anggap penting (Tajfel & Turner, 1978). Hal ini terjadi karena, individu mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari kelompok sosial mereka. Sehingga, konsep diri dan keberhargaan diri mereka akan terikat dengan gambaran kelompok sosial mereka yang ada di masyarakat. Apabila masyarakat mendiskriminasi kelompok sosial seorang individu, individu tersebut akan terganggu keberhargaan dirinya.

Luhtanen dan Crocker (1992), mengembangkan teori Tajfel dengan membentuk konstruksi *collective self-esteem*. *collective self-esteem* adalah sebuah konstruksi yang mencerminkan penilaian individu terhadap kelompok sosialnya, serta seberapa pentingnya sebuah kelompok terhadap gambar diri seorang individu. Konstruksi ini, mengukur jenis keberhargaan diri yang secara khusus berhubungan dengan diri individu sebagai bagian dari suatu kelompok sosial.

Bila dilihat dari fenomena pertama yakni fenomena pelunturan kebudayaan dan asimilasi, dapat disimpulkan bahwa individu-individu etnis Tionghoa mungkin memiliki *collective self-esteem* yang rendah karena diskriminasi. Hal ini dikarenakan, pelunturan kebudayaan merupakan pertanda bahwa seorang individu mulai memandang kelompok sosial mereka sebagai tidak berharga atau penting bagi mereka (Luhtanen & Crocker, 1992). Sehingga, mereka akhirnya terdorong untuk meninggalkan kebudayaan atau identitas etnis mereka.

Penelitian sebelumnya (Luhtanen & Crocker, 1992; Fischer & Holz, 2007; Scheepers dkk., 2009) telah menemukan adanya hubungan negatif antara persepsi diskriminasi dan *collective self-esteem*. Dalam ketiga penelitian tersebut, dijelaskan

bahwa terdapat hubungan negatif antara *perceived ethnic discrimination* dan *collective self-esteem*. Baik partisipan wanita (Fischer & Holz, 2007), imigran Afrika (Scheepers dkk., 2009) ataupun mahasiswa Amerika (Luhtanen & Crocker, 1992) memiliki *collective self-esteem* yang menurun bila tingkat *perceived ethnic discrimination* meningkat.

Meskipun ketiga penelitian tersebut tidak secara spesifik meneliti populasi di Indonesia, partisipan-partisipan dalam penelitian tersebut semuanya adalah individu-individu yang memersepsikan adanya pengalaman diskriminatif. Di Indonesia, kelompok etnis Tionghoa memiliki karakteristik yang serupa dengan partisipan penelitian-penelitian tersebut. Baik individu-individu etnis Tionghoa maupun partisipan penelitian sebelumnya, memersepsikan adanya pengalaman diskriminasi. Penelitian Eriyanti (2006) dan Anggraeni (2017) menjelaskan bahwa diskriminasi etnis juga memengaruhi konsep diri atau identitas individu etnis Tionghoa secara negatif. Sehingga, ada kemungkinan bahwa *perceived ethnic discrimination* juga memengaruhi *collective self-esteem* etnis Tionghoa seperti partisipan-partisipan pada penelitian sebelumnya.

Di sisi lain, fenomena kedua menunjukkan bahwa ada kemungkinan beberapa individu-individu etnis Tionghoa memiliki tingkat *collective self-esteem* yang lebih tinggi. Tingkat *collective self-esteem* yang tinggi, terjadi sebagai akibat dari perilaku etnis Tionghoa yang sengaja menutup diri dari kelompok etnis lain. Walaupun fenomena ini berlawanan dengan hasil penelitian sebelumnya (Luhtanen & Crocker, 1992; Fischer & Holz, 2007; Armenta & Hunt, 2009), namun perilaku ini tetap dapat dijelaskan secara teoretis.

Berdasarkan teori identitas sosial yang dibaharui oleh Hogg (2016), individu yang mengalami diskriminasi dapat mengalami peningkatan *collective self-esteem*. Hal ini dapat terjadi bila seorang individu bereaksi terhadap diskriminasi dengan cara mendekati diri mereka terhadap sesama anggota kelompok. Sehingga, mereka akan memperoleh dukungan yang dapat meningkatkan *collective self-esteem* mereka.

Adapun konstruksi *collective self-esteem*, dipilih secara spesifik karena diskriminasi pada etnis Tionghoa terjadi atas dasar kelompok sosial mereka. Individu-individu etnis Tionghoa, secara spesifik mengalami diskriminasi karena mereka merupakan bagian dari kelompok etnis Tionghoa Indonesia. Karena masyarakat sekitar memiliki sentimen negatif terhadap kelompok etnis Tionghoa, mereka secara tidak langsung akan mengarahkan sentimen-sentimen negatif tersebut terhadap individu-individu yang terhubung dengan kelompok etnis Tionghoa. Akibatnya anggota-anggota dari etnis Tionghoa akan menyadari bahwa diskriminasi yang mereka alami disebabkan oleh kelompok etnis mereka. Sehingga, *collective self-esteem* mereka akan lebih terpengaruh dibandingkan *self-esteem*. Karena *collective self-esteem* bersumber pada gambaran diri individu sebagai bagian dari suatu kelompok. Sedangkan, *self-esteem* bersumber pada keberhargaan diri individu dalam konteks pribadi.

Lebih lagi, tingkat *collective self-esteem* etnis Tionghoa masih dapat diteliti lebih lanjut. Karena individu-individu etnis Tionghoa kemungkinan memersepsikan diskriminasi secara berbeda-beda. Tidak semua individu menginternalisasi diskriminasi etnis yang mereka alami. Beberapa individu justru bereaksi dengan cara menutup diri mereka untuk melindungi diri dari diskriminasi,

Sehingga, hal ini menyebabkan tingkat *collective self-esteem* etnis Tionghoa belum dapat disimpulkan.

Pemilihan populasi dewasa muda, dilakukan secara khusus karena pembentukan keberhargaan diri individu di rentang usia dewasa muda, cenderung sudah lebih stabil dan akan terus stabil untuk waktu yang akan datang (Orth & Robbins, 2014). Dalam gambaran perkembangan *self-esteem* yang diajukan oleh Robins dan Trezniewski (2010), dapat dilihat bahwa terdapat kecenderungan *self-esteem* untuk meningkat secara stabil selama masa dewasa muda dan menengah. *Self-esteem* yang stabil selama usia dewasa muda, merupakan suatu aspek yang penting. Bila keberhargaan diri atau identitas mereka masih belum stabil, ada kemungkinan bahwa *self-esteem* atau identitas individu masih dipengaruhi faktor-faktor seperti pubertas atau *peer pressure*.

Di sisi yang lain, populasi dewasa menengah atau dewasa akhir, tidak tepat dipilih untuk populasi etnis Tionghoa. Individu-individu etnis Tionghoa yang berumur lebih tua kemungkinan akan terpengaruh oleh peristiwa-peristiwa traumatis seperti kerusuhan atau bentuk diskriminasi yang dulu terjadi. Sehingga ada kemungkinan bahwa *collective self-esteem* individu etnis Tionghoa yang berusia dewasa menengah dan akhir tidak lagi merepresentasikan keadaan etnis Tionghoa sekarang.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah *perceived ethnic discrimination* memengaruhi *collective self-esteem* individu dewasa muda dari kelompok etnis Tionghoa Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Melihat apakah ada pengaruh dari *perceived ethnic discrimination* terhadap *collective self-esteem* individu dewasa muda dengan etnis Tionghoa Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

1. Menambah wawasan dan kajian pada literatur mengenai dampak diskriminasi etnis di Indonesia
2. Menambah wawasan mengenai pentingnya menghargai keberagaman etnis di Indonesia
3. Menemukan pengaruh yang dimiliki diskriminasi etnis terhadap keberhargaan kolektif etnis Tionghoa di Jabodetabek

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Dapat menambah literatur dan informasi mengenai WNI keturunan Tionghoa
2. Dapat menambah pengertian masyarakat mengenai faktor-faktor yang bisa memengaruhi keberhargaan diri mereka.